

# BERITA ACDP



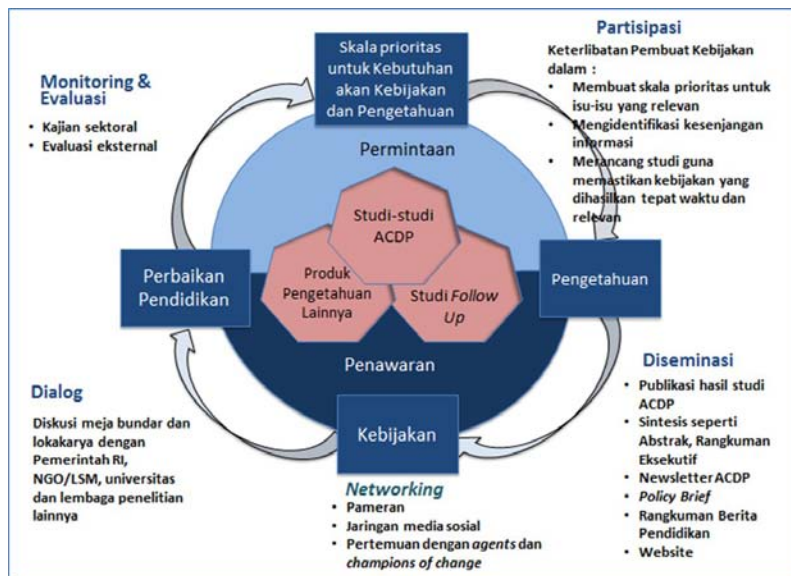
## Newsletter Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) - Maret 2013

Dalam Edisi Ini:

- Knowledge to Policy 1
- Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah 2
- Riviu Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan 3
- Mengembangkan Kapasitas Penelitian Perguruan Tinggi 3
- Pengembangan Strategi Kemitraan Perguruan Tinggi, Industri, dan Pemerintah 4
- Kegiatan Mendatang 4

### Knowledge to Policy

Salah satu tantangan utama ACDP adalah menjamin bahwa pengetahuan yang dibangun dari berbagai penelitian analitis dan riset dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan dan kemudian memberikan kontribusi dalam perbaikan kinerja sektor pendidikan. Riset dapat membawa perspektif baru dan menyegarkan dialog kebijakan. Namun hal tersebut sedemikian rupa harus digabungkan dengan proses komunikasi dan manajemen pengetahuan hingga dapat terus menjadi tepat waktu, dapat diakses dan digunakan dengan mudah, dan relevan terhadap kebutuhan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mencapai hal ini, komunikasi yang efektif sangat penting untuk mendiseminasi pengetahuan dan memfasilitasi dialog di antara pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan yang terinformasi dan telah dinegosiasikan sebelumnya. Kerangka kerja konseptual yang mendasari strategi komunikasi ACDP ini, seperti yang tercantum di bawah, adalah siklus pengetahuan dan kebijakan, dan lebih jauh dari itu, menggambarkan dampak kebijakan yang diharapkan terhadap kinerja sistem pendidikan.



ACDP adalah sarana untuk mempromosikan dialog kebijakan dan reformasi kelembagaan di sektor pendidikan di Indonesia.

Pelaksanaan ACDP dipimpin oleh ACDP Technical Oversight Group/ ATOG. Adapun ATOG diketuai bersama oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah instansi pelaksana ACDP. Bank Pembangunan Asia bertanggung jawab atas pengelolaan dana ACDP.

ACDP merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari Education Sector Support Program (ESSP) dan didukung dengan dana hibah dari Uni Eropa dan Pemerintah Australia.

Tantangan lain yang dihadapi institusi penelitian dan program seperti ACDP adalah terbatasnya permintaan pembuat kebijakan untuk pengetahuan berbasis riset yang bermutu. Selain pendekatan teknis yang berdasarkan proses deduksi rasional, proses pengembangan kebijakan bergantung kepada perspektif organisasi dan politik yang juga dapat mempengaruhi keputusan kebijakan, dimana faktor-faktor ini lebih mempengaruhi dibanding dengan hasil riset. ACDP mencoba untuk meningkatkan permintaan dengan meningkatkan kesadaran pembuat kebijakan mengenai manfaat riset yang bermutu dan mencoba untuk menjembatani perbedaan antara pengetahuan dan kebijakan dengan mendorong keterlibatan dan kepemilikan yang tinggi dalam tahapan identifikasi, desain, pelaksanaan, dan riviu dari penelitian yang ada.

Produk ACDP mencakup survei berskala nasional yang cukup kompleks hingga laporan singkat terkait topik yang diminta oleh Pemerintah. Produk-produk ini menekankan pilihan kebijakan yang praktis. Hasil dari penelitian ini tidak hanya didiseminasi untuk pembuat kebijakan namun juga kepada institusi riset lainnya seperti perguruan tinggi dan juga praktisi pendidikan dan pemangku kepentingan lain. Hasil-hasil ini juga dikemas dalam berbagai bentuk seperti abstrak, rangkuman eksekutif, policy briefs, rangkuman berita pendidikan, dan juga newsletter seperti ini.

## Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah

Tujuan Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah adalah untuk meriviu dan menilai sistem pendanaan pendidikan madrasah yang ada saat ini. Diharapkan, sistem pendanaan tersebut memberikan akses yang lebih merata terutama untuk madrasah swasta. Hasil penelitian juga diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan pilihan-pilihan kebijakan. Penelitian ini adalah upaya awal pemetaan secara jelas kondisi terkini pendanaan madrasah swasta maupun negeri yang merupakan bagian dari gambaran umum pendanaan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam pendanaan untuk madrasah. Perbedaan tersebut berakar pada tingkat makro dalam alokasi dana nasional serta tingkat mikro. Di tingkat pusat, alokasi dana untuk pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dengan rasio 80:20. Rasio ini menggambarkan kontribusi yang proporsional dalam angka partisipasi di sekolah dan madrasah. Walaupun Kementerian Agama mendukung semua pengeluaran terkait, pengeluaran untuk sekolah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dialokasikan secara terpisah dan juga kepada pemerintah kabupaten, terutama untuk biaya personel (yang mengambil proporsi terbesar dari biaya operasional.) Faktor utama yang membatasi pendanaan publik untuk madrasah adalah kerangka kebijakan yang tidak menyertakan pendidikan madrasah dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menjadi kendala dalam pendanaan yang sistematis untuk madrasah dan

secara umum dianggap sebagai pembatasan pendanaan. Melalui konsultasi di tingkat nasional dan kabupaten/kota, banyak pemerintah lokal menyatakan kesediaannya untuk mendukung madrasah swasta. Namun mereka merasa bahwa kerangka kebijakan yang ada memberikan batasan dalam melakukan hal tersebut. Perbedaan pendanaan dalam sistem pendidikan madrasah lebih jauh terjadi melalui adanya kecenderungan untuk memprioritaskan pendanaan untuk madrasah negeri dibanding swasta.

Secara umum, sistem pendidikan madrasah kurang beruntung dalam pendanaan publik jika dibandingkan dengan sekolah umum (Kemendikbud,) walaupun madrasah negeri mendapatkan alokasi yang lebih baik dari Kemenag. Madrasah swasta, yang jumlahnya mencapai 85% dari seluruh madrasah dan secara umum melayani masyarakat kurang mampu, harus bergantung kepada kontribusi orang tua. Pilihan kebijakan utama dalam studi ini terfokus kepada pendanaan sistematis kepada madrasah swasta oleh pemerintah lokal melalui perbaikan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Mengingat proses dan waktu yang akan diperlukan untuk mempertimbangkan ini, Studi ini merekomendasikan agar Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mencapai persetujuan dalam pengelolaan sementara khusus dimana manajemen pendidikan dasar madrasah didelegasikan kepada pemerintah lokal.



## Riviu Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

Kegiatan ACDP terkait riviu pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan dilakukan di bawah bimbingan Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Kegiatan ini mencakup analisis sektor pendidikan secara komprehensif dan sebagai hasilnya memberikan beberapa rekomendasi terkait. Riviu ini menemukan bahwa Indonesia telah memiliki lingkungan yang mendukung untuk melangkah lebih jauh dalam upaya mencapai keadilan, kesetaraan, dan pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan. Kemajuan yang cukup besar telah diraih dalam mencapai kesetaraan akses dan memelihara keseimbangan gender di tingkat nasional (Indonesia saat ini dalam proses memenuhi target MDG terkait kesetaraan gender di tingkat pendidikan dasar.) Kesuksesan ini merupakan hasil kombinasi antara kebijakan yang efektif dengan investasi nasional yang berkelanjutan yang berimbas kepada adanya sekolah di pedesaan dan pengurangan biaya langsung dan biaya oportunitas bersekolah. Adanya program netral gender seperti BOS dan pengembangan prasarana sekolah juga sangat penting. Namun demikian, data agregat nasional tidak menggambarkan secara jelas perbedaan yang masih terjadi di tingkat daerah, terutama tingkat sekolah menengah pertama dan atas. Indikator partisipasi menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki masih menghadapi berbagai hambatan dalam akses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak hanya terkait perempuan saja. Selain itu, sektor pendidikan masih dipimpin oleh laki-laki. Data nasional menunjukkan persentasi kepala sekolah wanita tetap rendah pada 33.6% dimana di tingkat SMP, persentasinya adalah 14.8% dan SMA 12.1%. Laki-laki juga tetap mendominasi sebagai dosen pendidikan tinggi, sementara di sebagian besar provinsi, jumlah dosen perempuan kurang dari 20% jumlah total yang ada.

Riviu ini juga menemukan banyak kemajuan dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Misalnya, adanya program percontohan dan inisiatif untuk mengembangkan kapasitas tenaga terkait seperti pengembangan modul pelatihan kepala sekolah, guru, pembimbing/konselor siswa dalam pendidikan yang responsif gender dan pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran yang responsif gender. Namun demikian, walaupun praktik-praktik yang baik mulai bermunculan, masih ada praktik-praktik yang dilakukan di kelas dan sekolah dan juga adanya buku teks yang masih mendukung stereotype gender; pembatasan bagi perempuan dalam berpartisipasi dalam kegiatan olah raga dan ekstrakurikuler; dan kondisi yang tidak aman di beberapa tempat untuk siswa perempuan pada saat menuju dan meninggalkan sekolah. Stereotype gender juga masih terjadi dalam pemilihan mata pelajaran dan alur belajar di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Dalam mendukung upaya institusionalisasi, sosialisasi dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengertian pihak terkait dalam kesetaraan gender telah banyak dilakukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana secara khusus untuk pengarusutamaan gender dan telah mengembangkan program percontohan yang inovatif. Namun demikian, saat ini belum ada petunjuk terkait strategi yang jelas dalam pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Selain itu, keberadaan staff yang memiliki pemahaman gender yang baik juga masih terbatas. Sebagai salah satu rekomendasi kunci dari Riviu ini, diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengembangkan strategi kesetaraan gender dalam sektor pendidikan.





## Mengembangkan Kapasitas Penelitian Perguruan Tinggi

Salah satu komponen program ACDP adalah pengembangan kapasitas penelitian melalui kegiatan penelitian itu sendiri. Saat ini sebanyak 18 perguruan tinggi negeri dan swasta Indonesia dan lebih dari 200 staffnya terlibat dalam sembilan penelitian ACDP. Peran perguruan tinggi dalam penelitian-penelitian ini sangat beragam, dari berfungsi sebagai lembaga penyedia konsultan spesialis untuk berbagai kegiatan seperti desain penelitian, analisis kebijakan, dan pemaparan hingga berpartisipasi dalam penelitian lapangan berskala nasional dan juga survei. Misalnya, pada tahun 2012, enam perguruan tinggi di Indonesia (Unsyiah Aceh, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka-Belitung, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan IAIN Surabaya) terlibat langsung dalam pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif sebagai bagian dari Survei Baseline Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas (melibatkan 5,000 kepala sekolah, 1,000 pengawas, dan 4,000 guru.) Pada tahun 2013, perguruan tinggi akan terus memberikan dukungan yang penting dalam melaksanakan survei berskala besar seperti Penelitian Ketidakhadiran Guru dan Survei Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Dampak dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh ACDP namun juga diharapkan dapat mendukung pengembangan kapasitas di berbagai daerah di Indonesia.

## Pengembangan Strategi Kemitraan Perguruan Tinggi, Industri, dan Pemerintah

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Pemerintah Republik Indonesia mencantumkan visi dalam memperkuat kemitraan perguruan tinggi, industri, dan pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan guna mendukung inovasi, pengembangan ekonomi kreatif, dan meningkatkan kemampuan berkompetisi. Dengan menggunakan konsep “Triple Helix,” penelitian ini melihat lebih dalam status kemitraan perguruan tinggi, industri, dan pemerintah tersebut. “Triple Helix” terdiri dari tiga elemen yaitu: i) peran perguruan tinggi yang lebih menonjol dalam inovasi, setara dengan industri dan pemerintah dalam masyarakat yang berbasis pengetahuan, ii) pergerakan menuju hubungan kolaborasi antara tiga komponen yang ada, dimana kebijakan inovasi semakin lebih banyak dihasilkan sebagai hasil interaksi ke tiga komponen dibanding dengan sebagai hasil dukungan pemerintah; dan iii) setiap komponen juga menjalankan peran yang dimiliki oleh komponen lain, menjalankan peran yang baru selain juga peran yang selama ini telah dijalankan. ([www.triplehelixassociation.org](http://www.triplehelixassociation.org))

Penelitian ini menemukan bahwa saat ini ketiga komponen (perguruan tinggi, industri, dan pemerintah) masih berkegiatan secara terpisah dan masih belum melakukan interaksi yang produktif dimana pengetahuan dikembangkan dan digunakan bersama. Tiga komponen ini belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memimpin pengembangan kemitraan yang efektif. Karena faktor politis dan industri, kecil kemungkinan pihak pemerintah atau industri dapat menjalankan fungsi yang menonjol seperti yang terjadi di negara Asia lainnya seperti Cina, Singapura, Korea, maupun Jepang. Dengan demikian, komponen perguruan tinggi bisa menjadi titik awal dalam memulai dan memimpin pengembangan kemitraan. Penelitian juga menemukan adanya kebutuhan mendesak untuk membedakan lebih jauh misi institusi perguruan tinggi dan perbaikan yang cukup besar dalam mutu penelitian yang relevan dan berorientasi pada aplikasi untuk industri yang berbasis pengetahuan. Hal ini, dikombinasikan dengan kelemahan dalam struktur insentif untuk mempromosikan penelitian dan pengembangan industri, telah menyebabkan berkurangnya relevansi institusi penelitian di Indonesia. Investasi untuk penelitian dan pengembangan di Indonesia sangat rendah jika

### Beberapa Perguruan Tinggi yang Terlibat Dalam Penelitian ACDP:

- Universitas Cendana - Kupang
- Universitas Sebelas Maret - Surakarta
- Institut Pertanian Bogor
- Universitas Syiah Kuala - Aceh
- Universitas Negeri Jakarta
- Universitas Negeri Yogyakarta
- IAIN Sunan Ampel Surabaya

dibandingkan dengan negara lain. Proporsi insinyur dan ilmuwan di Indonesia jika dibandingkan dengan jumlah populasi adalah salah satu yang paling rendah di dunia. Kendala lain adalah pendanaan yang terbatas dan rendahnya insentif untuk perguruan tinggi untuk melakukan riset strategis yang relevan dengan keperluan nasional.

Penelitian mengidentifikasi kebutuhan untuk menciptakan kesempatan yang terstruktur yang memungkinkan kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi. Selain itu, juga telah diidentifikasi adanya kebutuhan untuk memperbaiki kerangka kerja institusional yang memungkinkan perguruan tinggi negeri bekerjasama dengan industri (dengan implikasi terkait otonomi keuangan, status legal, dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.) Penelitian ini merekomendasikan penambahan dana serta promosi budaya penelitian dan pengembangan di kalangan industri, mengalokasikan pendanaan pemerintah dengan lebih efektif, dan mendukung pengembangan perguruan tinggi yang independen dan perbaikan mutu mereka. Perbedaan kapasitas dan mutu pada pendidikan tinggi di daerah juga penting untuk dibicarakan, terutama di daerah Indonesia Timur. Hal-hal ini penting untuk diperbaiki agar institusi terkait dapat menjalankan fungsi yang baik dalam mengembangkan berbagai koridor ekonomi seperti yang tercantum dalam MP3EI.

Kunjungan ke China (*Industrial Park* di Tsinghua University) dan Korea Selatan (KAIST dan Daedeok Innopolis di Daejeon) juga dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini untuk mengobservasi pusat penelitian dan pengembangan serta mempelajari lebih jauh praktik-praktik inovatif mereka. Selain itu, sebuah paper berjudul “Kemitraan Universitas, Industri, dan Pemerintah: Tantangan Saat Ini dan Masa Mendatang di Indonesia” telah dipaparkan dalam 10th Triple Helix Conference di Bandung tanggal 8-10 Agustus 2012 dan diterbitkan oleh Elsevier Procedia Social and Behavioral Science journal (<http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.468>)



# Kegiatan Mendatang

## Penelitian Kebijakan Pendidikan di Aceh



Sebagai bagian kerjasama ACDP dengan beberapa provinsi dan menjawab permintaan Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TK PPA,) ACDP akan mendukung pengembangan tiga kebijakan pendidikan di Provinsi tersebut. Dengan penyebaran sekolah yang belum merata dan secara umum sekolah-sekolah tersebut belum memenuhi standar yang ada, angka partisipasi sekolah menengah kejuruan cukup rendah di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pilihan kebijakan untuk perluasan dan perbaikan mutu sekolah kejuruan. Selain itu, penelitian akan berhubungan erat dengan apa yang diperlukan pasar tenaga kerja saat ini. Penelitian lainnya berhubungan dengan upaya efisiensi penggunaan tenaga guru. Selain merupakan isu kunci di bidang pendidikan di Indonesia, efisiensi penggunaan tenaga guru merupakan salah satu tantangan terbesar di Aceh. Untuk dapat mengembangkan beberapa pilihan dalam memperbaiki efisiensi dalam perencanaan dan penggunaan tenaga guru, ACDP akan meneliti lebih jauh hal terkait distribusi guru serta proses rekrutmen dan pendanaan. Penelitian yang ke tiga adalah riviui dampak dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Minyak dan Gas (Migas) terhadap bidang pendidikan, terutama dalam pengalokasian dana, efisiensi pembelanjaan dana, dan kinerja sektor pendidikan. ACDP bekerjasama dengan *Support for Education Sector Development in Aceh* (SEDIA yang didukung oleh AusAID.) Penelitian-penelitian ini akan dimulai pada bulan Mei.

## Penelitian Ketidakhadiran Guru

Ketidakhadiran guru merupakan faktor utama yang berdampak pada hilangnya waktu pengajaran dan mempengaruhi mutu hasil pembelajaran. ACDP akan memulai penelitian terkait ketidakhadiran guru pada bulan Maret 2013. Penelitian yang akan dilakukan selama satu tahun ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait sampai sejauh mana dan kemungkinan penyebab ketidakhadiran guru di Indonesia. Hasil penelitian juga diharapkan dapat mendukung formulasi kebijakan untuk meningkatkan kehadiran dan akuntabilitas guru di kelas di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Penelitian yang komprehensif ini akan berdasarkan pada sampel sekolah yang representatif. Selain itu, metodologi penelitian akan mengikuti metodologi penelitian yang telah dilakukan oleh Bank Dunia dan *Harvard University* pada tahun 2002-2004 di banyak negara. Untuk penelitian yang sama di Indonesia telah dilakukan oleh SMERU. Penelitian ACDP ini baru akan dilakukan oleh *Cambridge Education International* (UK) bekerja sama dengan SMERU dan *Australian Council for Education Research* (ACER) dan kolaborasi teknis dengan Bank Dunia.

## Mid-Term Review Rencana Strategis Pendidikan 2010-2014

ACDP mendukung Pemerintah Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Bappenas) dalam persiapan perencanaan pendidikan periode 2015-2019 melalui *Mid Term Review Rencana Strategis Pendidikan 2010-2014*. Kegiatan ini akan menghasilkan asesmen yang komprehensif terkait perkembangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional pada pertengahan kegiatan periode 2010-2014. Asesmen dan rekomendasi yang ada akan digunakan sebagai masukan dalam perbaikan strategi terkait dan dalam pengembangan Renstra Pendidikan 2015-2019. Tujuan lain kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas terkait perencanaan strategis pendidikan nasional, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar untuk memperkuat pengembangan program dan kebijakan dimasa yang akan datang. Kegiatan akan dimulai pada bulan April.

## Survei Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Dimulai pada bulan Maret 2013, ACDP mendukung survei nasional terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Agar survei ini memiliki data yang representatif secara nasional, kegiatan akan dilakukan di enam provinsi di Indonesia dan mencakup lebih dari 5,000 sekolah dan madrasah. Hasil survei akan menghasilkan gambaran terkait pencapaian SPM secara nasional dan asesmen pencapaian SPM dibandingkan dengan hasil Survei Baseline SPM tahun 2010. Survei Baseline tersebut menunjukkan pencapaian yang masih harus diperbaiki dalam beberapa indikator seperti jumlah ruang kelas, kualifikasi dan sertifikasi kepala sekolah dan guru, pengadaan bahan belajar seperti buku, jumlah jam mengajar, dan pengawasan terhadap sekolah. Diharapkan hasil Survei ini, bersama dengan dukungan pengembangan kapasitas untuk perencanaan, pengelolaan, dan monitoring SPM, akan memperkuat sistem dalam menentukan target dan mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar.



## SEKRETARIAT ACDP

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung E, Lantai 19. Jalan Jenderal Sudirman, Senayan. Jakarta 10270.  
Phone: +62-21-578-51100. Fax: +62-21-578-51101.  
Email: [sekretariat@acdp-indonesia.org](mailto:sekretariat@acdp-indonesia.org). Website: [www.acdp-indonesia.org](http://www.acdp-indonesia.org)